

Buletin



Biro Pemberitaan Parlemen

PARLEMENTARIA

KORPOLKAM
DPR Siap
Berbenah

KOMISII
Pentingnya
Jaga Persatuan
dan Stabilitas
Nasional



DPR
Terima
Aspirasi
Publik

Nomor 1359/1/IX/2025 September 2025



9 772614 339005





FOTO: YOG/ AHA

Dari kiri ke kanan : Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal menerima perwakilan mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (3/9/2025).

DPR Terima Aspirasi Publik

Pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekurangan dan kekeliruan lembaga dalam menjalankan tugas serta fungsi perwakilan rakyat. Permintaan maaf tersebut disampaikan menyusul peristiwa aksi mahasiswa beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa momentum ini akan menjadi evaluasi dan upaya reformasi DPR kedepannya sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat.

“Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi

dan perbaikan menyeluruh,” kata Dasco dalam agenda pertemuan Pimpinan DPR RI dengan Perwakilan Mahasiswa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Reformasi DPR ke depan akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Reformasi ini ditujukan untuk menghadirkan DPR yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di mata publik.

Selain evaluasi internal, DPR juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan pemerintah untuk menangani sejumlah isu strategis yang menjadi sorotan masyarakat. Untuk itu pertemuan dengan pihak pemerintah pun dijadwalkan untuk memastikan langkah-langkah tersebut dapat segera dijalankan.

Selain itu, Dasco mengatakan bahwa DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah untuk memastikan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dapat menyalurkan aspirasi kepada pemerintah.

Dasco menambahkan, tradisi menerima aspirasi mahasiswa sebenarnya bukan hal baru. Hanya saja, dalam beberapa aksi sebelumnya kondisi di lapangan tidak kondusif karena adanya pihak-pihak yang menunggangi aksi mahasiswa. “Hari ini aspirasi dapat kami terima langsung, dan segera kami tindaklanjuti dengan pemerintah,” tambahnya.

ujm/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya





DPR Siap Berbenah



FOTO: FHN/PDT

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat audiensi dengan BEM SI dan berbagai elemen Masyarakat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa DPR siap melakukan evaluasi internal secara menyeluruh sebagai respons atas berbagai kritik publik. Saan menyampaikan, DPR menyadari bahwa lembaga legislatif turut menjadi sorotan dalam dinamika politik dan sosial akhir-akhir ini.

Karena itu, DPR berkomitmen untuk lebih transparan, akuntabel, dan profesional dalam menjalankan tugas. "Komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama," ujar Saan saat DPR audiensi dengan BEM SI dan berbagai elemen Masyarakat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mencontohkan salah satu langkah yang sudah dilakukan, yaitu

keputusan DPR membatalkan tunjangan rumah bagi anggota parlemen. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah bentuk keseriusan DPR dalam merespons keresahan publik.

Selain itu, DPR juga akan membicarakan langkah efisiensi lain bersama pimpinan fraksi. "Kami memahami situasi dan kegelisahan masyarakat. Karena itu, hasil evaluasi ini akan diumumkan ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban," tambahnya.

Saan menekankan bahwa kritik dan masukan dari mahasiswa, masyarakat sipil, hingga organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk menjadi bagian dari proses pembenahan DPR. "Kami ingin DPR yang transparan, akuntabel, dan profesional ke depan," tutupnya. **fa/aha**



Buletin
PARLEMENTARIA

KORPRIKUM DPR Siap Berbenah

KEMISI Perencanaan dan Stabilitas Nasional

DPR Terima Aspirasi Publik

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analists Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Prima Danurirta, A.Md.,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purnito Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulla, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrissa Dwipa

Telp. 021-571 5697
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Scan QR untuk berita selengkapnya

Pentingnya Jaga Persatuan dan Stabilitas Nasional

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika nasional yang berkembang. Hal tersebut disampaikan Utut dalam konferensi pers usai rapat kerja Komisi I bersama Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9).

“Yang jelas, Komisi I sepakat bahwa kita harus menjaga betul

persatuan dan kesatuan. Bapak Presiden, sebagaimana disampaikan di Batujajar, nafasnya adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Beliau menginginkan kita ke depan maju tanpa saling menyalahkan,” ujar Utut.

Selain membahas rencana kerja dan anggaran pertahanan Tahun 2026, Utut mengungkapkan Komisi I DPR RI bersama mitra kerja juga menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban jiwa wafatnya anggota masyarakat dalam peristiwa 28–31 Agustus 2025. “Kemarin tentu semua sudah terinformasikan, kita doakan

mereka semua khusus khotimah,” ucap Utut.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menambahkan Pemerintah prihatin atas maraknya tindakan anarki dalam beberapa hari terakhir. Wamenhan menegaskan, Presiden telah memberikan arahan agar TNI dan Polri bertindak tegas dan terukur menjaga ketertiban. Wamenhan juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun kondusifitas nasional.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa TNI tetap tegak pada konstitusi dalam menjaga keamanan negara. Ia membantah isu yang berkembang di media sosial mengenai kemungkinan penerapan darurat militer. “Kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah jauh dari apa yang kita lakukan. Kita taat konstitusi,” tandas Wakil Panglima TNI. — **pun/aha**



FOTO: ARI/PDI

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat konferensi pers usai rapat kerja Komisi I bersama Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara di Kompleks Parlemen, Senin (1/9/2025).



Penguatan BUMD Jadi Instrumen Kemandirian Daerah

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Aria saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sulawesi Selatan, dengan agenda pengawasan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar).

“Intinya kita ingin memastikan BUMD tidak menjadi beban anggaran, melainkan mampu menjadi instrumen penguatan pendapatan daerah, baik melalui dividen maupun pelayanan publik,” ujar Aria Bima di Makassar, Rabu (27/8)

Aria mencontohkan, daerah yang memiliki potensi laut, pertambangan, maupun perkebunan semestinya memiliki BUMD yang dikelola secara profesional agar tidak hanya dikuasai oleh perusahaan pusat atau swasta besar. Ia menekankan, sinergi antara BUMD dan BUMN harus dibangun, sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan peran badan usaha milik negara dan daerah dalam pembangunan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Aria juga menyoroti turunnya alokasi

Memastikan BUMD tidak menjadi beban anggaran, melainkan mampu menjadi instrumen penguatan pendapatan daerah



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Sulawesi Selatan, Rabu (27/8/2025).

transfer ke daerah sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, ia mengapresiasi optimisme pemerintah daerah Sulawesi Selatan untuk tetap kreatif mencari ruang-ruang pendapatan baru tanpa membebani rakyat. “Jangan lagi solusi instan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara sepihak, karena itu justru memicu keresahan. Pendapatan daerah harus ditingkatkan dengan inovasi dan kreativitas, bukan menekan rakyat,” tegasnya.

Dia juga menekankan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Bank Sulselbar, yang hingga kini masih berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan belum bertransformasi menjadi Perseroda sesuai amanat PP No. 54 Tahun 2017. **ssb/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: DEP/ PDT

Pergantian Pimpinan Komisi III DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Kamis (4/9/2025.)

Rusdi Masse Mappasessu Jadi Pimpinan Komisi III

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Rusdi Masse Mappasessu menggantikan Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI. Pergantian tersebut telah ditetapkan secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Sebelumnya Fraksi Partai NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI. Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula

merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

“Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

Adapun, Pimpinan Komisi III saat ini adalah:

Ketua Komisi III :

Habiburokhman
(Fraksi Partai Gerindra)

Wakil Ketua Komisi III :

1. Dede Indra Permana Soediro
(Fraksi PDI-Perjuangan)
2. Sari Yulianti (Fraksi Partai Golkar)
3. Rusdi Masse Mappasessu
(Fraksi Partai NasDem)
4. Moh. Rano Alfath
(Fraksi PKB) **bia/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dorong Penyaluran SPHP Dipercepat

Anggota Komisi IV DPR RI Heri Dermawan mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan). Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras.

Ia melihat adanya koreksi atau penyesuaian harga beras. Harapannya, tren positif ini dapat segera meluas sehingga harga beras nasional bisa lebih stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

"Laporan yang saya terima bahwa Kementan bisa menjaga harga-harga bahan pokok penting tetap stabil. Bahkan untuk beras

cenderung ada yang terkoreksi, walaupun belum menyeluruh, mudah-mudahan secepatnya bisa dikoreksi semuanya," kata Heri dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9).

Untuk itu, Heri mendorong agar penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dipercepat sesuai kebutuhan. Ia juga berharap agar Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat ditingkatkan dan menjangkau masyarakat.

"Mohon juga Gerakan Pangan Murah diperbanyak sebanyak-banyaknya. Bila perlu 4-5 kali lipat. Ini sangat dibutuhkan masyarakat," ungkapnya.

Selain itu, Heri juga memuji program prioritas yang telah

disiapkan Kementan di tahun 2026. Ia menilai program Kementan sangat komprehensif dan relevan untuk menjawab kebutuhan nasional. Mulai dari peningkatan produksi padi, jagung, dan komoditas strategis, termasuk daging telur dan susu; cetak sawah dan optimalisasi lahan; penyediaan air untuk pertanian; penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian, pupuk bersubsidi; penyuluhan dan regenerasi petani; serta hilirisasi.

"Saya membaca program prioritas Kementan di tahun 2026 ini sangat luar biasa. Kalau ini bisa tercapai, makmurlah kita. Saya rasa kebangkitan swasembada pangan pasti akan segera tercapai," ucapnya. — **hal/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi IV DPR RI Heri Dermawan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).



FOTO: UM/PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda saat meninjau Bendungan Kali Bekasi dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/8/2025).

Percepat Mitigasi Kali Bekasi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan penanganan banjir di Kabupaten dan Kota Bekasi harus tuntas ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikannya saat meninjau Bendungan Kali Bekasi dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI terkait pengawasan infrastruktur sumber daya air khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/8).

Ia mengingatkan, banjir besar yang melanda Bekasi pada bulan

Maret 2025 lalu, bukanlah kejadian baru. Sebagai tanggap cepat, Kementerian PU langsung menerjunkan tim tanggap darurat di Bekasi. Upaya itu meliputi evakuasi warga dengan perahu karet, penyediaan tenda pengungsian, mobil tangki air, hidran umum, hingga pompa air berkapasitas 250 liter per detik.

Tak hanya itu, ratusan sandbag juga ditempatkan di titik rawan banjir di Kemang Pratama dan Rawalumbu. Dalam jangka menengah, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Kementerian

PU mulai mengerjakan paket proyek pengendalian banjir Kali Bekasi.

“Segera tanggap masalah banjir ini supaya ditangani secara lebih komprehensif dan tidak lagi menimbulkan kerugian berulang bagi masyarakat,” ujar Huda.

Setali tiga uang, Anggota Komisi V DPR RI Sudjatkiko meminta penyelesaian sodetan Kali Bekasi tahap 1–7 segera dituntaskan. Menurutnya, sodetan tersebut sangat krusial dalam mengurangi banjir besar yang terjadi hampir setiap lima tahun.

Apalagi, berdasarkan laporan yang diterimanya, diketahui penataan ruang dan sistem drainase di Bekasi berpeluang semakin memperparah dampak banjir. “Mitigasi banjir tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur besar, tetapi juga penataan ruang kota, drainase lingkungan, serta upaya teknologi seperti modifikasi cuaca yang bisa menekan curah hujan ekstrem,” tegasnya. **um/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Inovasi Teknologi Atasi Sedimentasi Sungai



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti saat Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Kamis (28/8/2025).

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong penggunaan teknologi inovatif untuk mengatasi permasalahan sedimentasi sungai yang selama ini hanya ditangani melalui pengerukan. Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Kamis (28/8).

Menurut Novita, pengerukan sungai bukan solusi jangka panjang karena sedimentasi akan terus kembali terjadi dalam waktu singkat. “Kalau kita selalu harus melakukan pengerukan dari

sedimentasi yang ada, maka pasti akan cepat itu. Sebentar lagi sudah dikeruk, sedimentasi lagi. Terus ketumpuk lagi. Ada nggak teknologi yang bisa menangani tidak seperti itu?” ungkap legislator Dapil Jawa Tengah VIII ini.

Novita mencontohkan kondisi di daerah pemilihannya, Cilacap, yang juga memiliki permasalahan serupa di Sungai Kaliyasa dan Segara Anakan. Ia mengaku pernah mendapat penjelasan dari pejabat teknis Kementerian Pekerjaan Umum bahwa terdapat teknologi baru yang dapat digunakan untuk mengatasi sedimentasi secara lebih efektif dengan biaya yang lebih ringan.

“Saya ingin memastikan, apakah yang pernah disampaikan Dirjen periode sebelumnya itu betul atau tidak, bahwa ada teknologi baru yang bisa mengatasi sedimentasi tanpa harus terus-menerus dikeruk,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya pemerintah serius mencari terobosan teknologi agar permasalahan sedimentasi tidak selalu membebani anggaran negara. “Kalau hanya mengandalkan pengerukan, tentu akan menyedot biaya besar dan hasilnya tidak bertahan lama. Harus ada inovasi teknologi yang bisa menjadi solusi jangka panjang,” pungkasnya.

aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Dukungan untuk Kopdes Merah Putih

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi rakyat di desa. Menurutnya, program koperasi ini bisa menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, namun membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan lintas kementerian terkait.

“Banyak hal yang dibutuhkan koperasi desa ini. Kalau programnya baik dan punya substansi, maka Kementerian Perdagangan harus memastikan kontribusinya. Butuh biaya berapa? Itu harus masuk dalam konstruksi APBN,” dalam agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9).

Dirinya pun mengingatkan, tanpa dukungan dari

kementerian lain seperti Kementerian Pertanian maupun Kementerian Koperasi dan UKM, Koperasi Desa Merah Putih akan sulit berjalan. Menurutnya, konsep

Koperasi desa bisa meningkatkan putaran ekonomi masyarakat

koperasi ini harus terhubung dengan ekosistem perdagangan nasional agar benar-benar memberikan manfaat nyata.

Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baginya, seharusnya tidak hanya menjadi program simbolis. Dengan arah dan tujuan yang jelas, ia ingin koperasi desa bisa meningkatkan putaran ekonomi masyarakat, terutama di sektor pangan dan kebutuhan pokok.

Mengakhiri pernyataannya, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi salah satu instrumen negara dalam mengurangi ketergantungan pada mekanisme pasar yang kerap dikuasai pelaku besar. Dengan memperkuat koperasi di desa, harapannya, masyarakat bisa merasakan langsung manfaat pembangunan.

“Program koperasi ini memiliki substansi, arah, dan tujuan yang baik. Kalau didukung serius, Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi bagian penting dalam strategi memperkuat perdagangan rakyat,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu. — **um/aha**

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

FOTO: FHN/PDT

Ancaman Industri Nasional

Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, menyoroti persaingan tidak sehat di industri nasional, terutama akibat maraknya produk ilegal yang masuk ke pasar Indonesia. Hatta menyampaikan kekhawatirannya setelah mengunjungi salah satu produsen speaker kelas dunia di Indonesia, CV Sinar Baja Electric, di Surabaya, Jawa Timur, yang mengeluhkan banyaknya produk ilegal membanjiri pasar Indonesia.

Menurutnya, masalah ini menghambat industri lokal untuk berkembang. “Kenapa kok bisa masuk ke Indonesia sampai seperti itu? Karena bagaimanapun kalau produk ilegal itu masuk ke Indonesia, dia akan menekan pasar Indonesia,” kata Hatta, kepada **Parlementaria**, usai kunjungan kerja spesifik Panja Daya Saing



Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Hatta, saat melakukan kunjungan ke salah satu produsen speaker kelas dunia di Indonesia, CV Sinar Baja Electric, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).

Industri Komisi VII DPR RI ke Surabaya, Jatim, Kamis (28/8).

Hatta menjelaskan bahwa produk ilegal menciptakan *predatory pricing* yang berbahaya bagi industri dalam negeri. “Ketika industri kita tidak bisa *survive* menghadapi produk-produk yang ilegal, yang seharusnya membayar pajak tapi mereka tidak membayar pajak, ya itu kan menghambat mereka untuk berkembang lebih besar,” pungkasnya.

Untuk itu, ia pun mengusulkan adanya lembaga perlindungan industri di Indonesia. Hadirnya lembaga ini menurutnya penting untuk dapat melindungi dan menjadi wadah industri dalam meningkatkan daya saing industri nasional. “Ini yang mungkin menurut saya perlu dipikirkan oleh Kementerian Perindustrian, untuk bisa melindungi industri ini,” tambahnya.

Selain itu, Hatta juga berharap pemerintah dapat membantu industri nasional dengan memberikan suntikan subsidi bagi produk-produk lokal yang ingin bersaing di pasar global. Mengingat beberapa negara termasuk Tiongkok telah melakukan hal serupa. — **bia/aha**



Scan QR untuk berita selengkapnya



Industri Agro Punya Potensi Besar

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya penguatan daya saing industri nasional, khususnya sektor agro, agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan kerja spesifik Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Jababeka dan Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Kamis, (28/8).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII turut resmikan pelepasan

ekspor produk biskuit dari PT URC Indonesia ke negara Pantai Gading. Menurut Evita, capaian ini menunjukkan potensi besar industri agro Indonesia sebagai penopang ekonomi nasional.

“Ekspor agro kita ini luar biasa, bahkan menyumbang 41 persen terhadap PDB non migas nasional. Ini artinya sektor agro benar-benar bisa menjadi penopang devisa kita. Namun, daya saing kita masih kalah dengan negara-negara lain,” ungkapnya.

Ia juga, mencontohkan Thailand dengan beras dan Vietnam dengan

kopi yang berhasil membangun branding dan kemasan produk sehingga mampu menguasai pasar global. Sementara Indonesia, meskipun memiliki kualitas produk yang tidak kalah unggul, masih menghadapi sejumlah hambatan.

“Masalah terbesar ada di biaya operasional yang tinggi, terutama energi dan gas. Ini yang harus segera kita cari solusinya melalui pembahasan di Panja. Industri kita punya peluang luar biasa, tapi daya saing harus diperkuat dengan kebijakan yang tepat,” tegasnya.

Evita juga menyoroti banyaknya produk Indonesia berkualitas ekspor yang justru tidak beredar di dalam negeri, seperti biskuit ekspor dan mainan produksi Indonesia yang hanya dijual di luar negeri. — **upi/aha**



FOTO: UUF/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, bersama tim dalam kunjungan kerja spesifik Panja Daya Saing Industri Komisi VII DPR RI ke Kawasan Industri Jababeka dan Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Kamis, (28/8/2025).



Scan QR untuk berita selengkapnya

Maksimalkan Lobi ke Arab Saudi

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan Kementerian Haji dan Umrah nantinya harus mampu memaksimalkan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, kehadiran kementerian ini akan menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai persoalan klasik penyelenggaraan ibadah haji, terutama tingginya biaya perjalanan dan panjangnya antrean jemaah.

Apalagi, tegasnya, ia mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar biaya haji bisa lebih terjangkau tanpa menurunkan kualitas layanan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan berupa pemangkasan masa tinggal jemaah di Arab Saudi dari 40 hari menjadi 30 hari.

“Kalau masa tinggal jemaah bisa dipangkas menjadi 30 hari, maka biaya haji berpotensi

Mahalnya biaya tiket pesawat yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam ongkos haji. Ia menilai sistem kontrak yang berlaku saat ini merugikan jemaah, karena mereka harus membayar tiket penuh pulang-pergi

berkurang sekitar Rp5 juta per orang. Itu salah satu yang harus dilobi secara serius ke pemerintah Saudi,” ujar Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf, dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).

Ia menjelaskan, alasan masa tinggal yang panjang selama ini kerap dikaitkan dengan keterbatasan bandara dan sistem penerbangan di Arab Saudi. Namun menurutnya, ada banyak alternatif bandara internasional yang seharusnya bisa digunakan untuk memperlancar arus keberangkatan dan kepulangan jemaah.

Hidayat juga menyoroti mahalnya biaya tiket pesawat yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam ongkos haji. Ia menilai sistem kontrak yang berlaku saat ini merugikan jemaah, karena mereka harus membayar tiket penuh pulang-pergi meski pesawat dalam kondisi kosong pada salah satu rute.

Selain menekan biaya, Hidayat mengingatkan pentingnya lobi diplomatik untuk memaksimalkan serapan kuota haji. Tahun ini, tercatat masih ada 171 kuota reguler dan 148 kuota khusus yang tidak terisi. — **um/aha**



Anggota Komisi VIII DPR RI
Hidayat Nur Wahid.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO : AFR/PDT

Efektivitas Program Kesehatan Gratis

Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dinilai masih memerlukan banyak perhatian agar lebih efektif. Kelengkapan layanan, kesiapan SDM kesehatan, dan tindak lanjut pemeriksaan disebut sebagai faktor kunci untuk memastikan tujuan program dapat tercapai.

“Ada tiga poin yang saya *highlight* ya kepada kunjungan kali ini. Pertama, adalah soal bagaimana terkait dengan kelengkapan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Itu

saya pikir jadi faktor krusial,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Rabu (27/8).

Politisi Fraksi PKS ini mengakui saat ini item pemeriksaan sudah lebih lengkap dibanding awal pelaksanaan. Namun, ke depan kualitas layanan perlu terus ditingkatkan agar efektivitas skrining benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Gamal juga menyoroti persoalan keterbatasan SDM

kesehatan. Menurutnya, ada potensi peningkatan beban kerja bertambahnya pasien BPJS dan PKG. Ia menilai hal ini berpotensi menurunkan intensitas upaya promotif dan preventif di masyarakat.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Setiap temuan kesehatan dari PKG diharapkan tidak berhenti pada tahap skrining, melainkan segera ditangani dengan langkah promotif, kuratif, hingga rehabilitatif.

Adapun dalam paparan Dinas Kesehatan Kota Tangerang, sejumlah jenis pemeriksaan PKG yang dilakukan antara lain tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkaran perut, aktivitas fisik, gula darah, risiko stroke, risiko jantung dengan EKG, hingga fungsi ginjal. Pemeriksaan dilakukan melalui *self-assessment*, pengukuran oleh tenaga kesehatan, serta pemeriksaan lanjutan di laboratorium dan EKG.

uc



FOTO: LUCIA/PDT

Scan QR untuk berita selengkapannya



Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal, saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX ke Puskesmas Karawaci Baru, Kota Tangerang, Rabu (27/8/2025).

Pemerataan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Daerah 3T



FOTO: ADI/PDI

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, dalam foto bersama saat mengikuti kunjungan kerja ke Puskesmas Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (27/08/25).

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan, khususnya pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurutnya, pemerintah perlu melakukan langkah nyata melalui transformasi sistem kesehatan agar masyarakat di wilayah 3T mendapatkan akses layanan yang optimal.

“Untuk daerah-daerah 3T kami berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Yang pertama,

transformasi di Kementerian Kesehatan ini harus berjalan secara optimal,” ujar Cellica kepada **Parlementaria**, di Puskesmas Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (27/8).

Ia menjelaskan, ada beberapa aspek penting yang menjadi fokus, mulai dari transformasi prasarana kesehatan, penyediaan sumber daya manusia (SDM), hingga digitalisasi layanan kesehatan.

Lebih lanjut, Cellica menekankan perlunya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan. Menurutnya, tantangan di daerah 3T bukan hanya soal fasilitas dan tenaga medis, tetapi

juga terkait infrastruktur, akses transportasi, dan pendidikan.

“Kemenkes harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat, khususnya di wilayah 3T,” tutup Cellica.

Dengan adanya upaya transformasi dan sinergi antarinstansi, diharapkan program pemeriksaan kesehatan gratis dapat lebih merata dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah 3T yang selama ini masih kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan memadai. **— adi/rdn**



Panja PTKL Bentuk Kegelisahan Anggaran Pendidikan

Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke LLDIKTI Wilayah VII Surabaya. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi X, My Esti Wijayati, mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) PTKL dibentuk sebagai respons atas kegelisahan terkait disparitas anggaran pendidikan di Indonesia.

“Panja ini berawal dari kegelisahan kami. Ketika anggaran Dikti Saintek itu sangat rendah dibandingkan dengan anggaran yang berada di PTKL,” ujar My Esti di Surabaya, Kamis (28/8).

Maka dari itu, hal ini menurutnya, menjadi alasan utama Komisi X berupaya menertibkan kebijakan dan anggaran agar sesuai dengan putusan konstitusi. Ia melanjutkan bahwa ketidaksesuaian ini terjadi karena perlakuan dan tujuan pendidikan kedinasan berbeda dari pendidikan tinggi pada umumnya.

Ia menilai, PTKL seharusnya menyiapkan lulusan khusus untuk kebutuhan kementerian induknya justru cenderung membuka program studi umum. “PTKL ini membuka prodi-prodi yang tidak dibutuhkan oleh kementerian tersebut,” katanya,

Untuk menertibkan kebijakan dan anggaran, My Esti menegaskan bahwa isu-isu ini akan

Panitia Kerja (Panja) PTKL dibentuk sebagai respons atas kegelisahan terkait disparitas anggaran pendidikan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X, My Esti Wijayati, saat kunjungan kerja ke LLDIKTI Wilayah VII Surabaya, Kamis (28/8/2025).

diintegrasikan ke dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Bagaimana PTKL, bagaimana PTS, kemudian bagaimana PTN dan bagaimana Kemenag, Kemendikti maupun beberapa komponen lain yang memang kita harus perhatikan di situ,” tegasnya.

Menurut My Esti, hal ini perlu dilakukan untuk menata ulang peran dan posisi seluruh institusi pendidikan, termasuk yang ada di bawah Kementerian Agama seperti UIN, yang kini memiliki dualisme kepemimpinan dan membuka prodi umum. — **hal/aha**



FOTO: HAL/PDT

Partisipasi Pemda Bangun Aglomerasi Jakarta



FOTO: MRO/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPRI, Rabu (3/9/2025).

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah pusat mengikutsertakan pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan aglomerasi Jakarta.

“Seperti Kabupaten Bekasi yang memiliki posisi strategis dalam kebijakan aglomerasi, sehingga perlu terlibat aktif dalam setiap tahapannya,” imbuhnya dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala

Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPRI, Rabu (3/9).

Kawasan aglomerasi tersebut mencakup DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Seluruh wilayah di Indonesia, terutama kota-kota besar menghadapi dampak nyata dari tantangan global, termasuk perubahan iklim. Untuk itu, seluruh pihak perlu bersinergi dalam

melanjutkan agenda pembangunan yang telah dirintis sejak masa Presiden Soekarno hingga sekarang.

“Prioritas apa saja yang nanti akan dimasukkan dalam pembangunan kawasan aglomerasi ini. Adanya aglomerasi ini juga mendukung semua tatanan bukan hanya transportasi saja tapi juga sosial ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.

Kawasan aglomerasi tersebut mencakup DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

Pembangunan aglomerasi Jakarta bukan hanya persoalan tata ruang, melainkan juga bagian penting dari kesinambungan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari kontribusi Pulau Jawa yang mencapai 57,1 persen terhadap PDB nasional, sementara kawasan metropolitan Jakarta sendiri telah menyumbang lebih dari 25 persen PDB nasional. Angka ini mencerminkan besarnya tanggung jawab kawasan ini dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. **tn/aha**



Listrik Tulang Punggung Ekonomi Indonesia

Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya menjadikan sektor kelistrikan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Melalui rencana revisi Undang-Undang Ketenagalistrikan, Komisi XII menargetkan ketersediaan listrik yang terjangkau dan merata, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Dalam kunjungan kerja ke Universitas Gadjah Mada (UGM) di

Provinsi Yogyakarta, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan

Fokus utama dari revisi ini adalah memastikan harga listrik tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan saat mengikuti kunjungan kerja ke Universitas Gadjah Mada (UGM) di Provinsi Yogyakarta, Jumat (29/08/2025).



menyampaikan pentingnya peran listrik bagi kehidupan masyarakat.

“Kelistrikan menyangkut hidup orang banyak dan sangat penting sekali bagaimana kelistrikan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Jumat (29/8).

Menurut Rokhmat, salah satu fokus utama dari revisi ini adalah memastikan harga listrik tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan bahwa biaya energi yang terkontrol merupakan kunci untuk menjaga daya saing industri dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, Rokhmat menyoroti pentingnya pemerataan akses listrik hingga ke pelosok negeri.

Ia menyayangkan bahwa setelah 80 tahun merdeka, masih ada daerah yang belum memiliki akses listrik yang memadai. Pemerataan ini, lanjut Rokhmat, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada energi. Swasembada di bidang kelistrikan tidak hanya berarti ketersediaan pasokan yang cukup, tetapi juga distribusi yang adil. Dengan demikian, tidak ada lagi kesenjangan energi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dalam revisi undang-undang ini, Komisi XII juga akan menyoroti optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber energi yang melimpah di Indonesia. Dengan pemanfaatan yang tepat, pendistribusian listrik bisa dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menarik minat para investor. Rokhmat menjelaskan bahwa kehadiran investor akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

 **ndn/rdn**



FOTO: NDN/PDT

RUU Ketenagalistrikan Upaya Kemandirian Energi



Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, saat memimpin Kunjungan Kerja dalam rangka menyerap masukan dari civitas akademisi terhadap RUU Ketenagalistrikan di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (29/08/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menegaskan perlunya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang sudah berusia 15 tahun. Menurutnya, banyak pasal dalam undang-undang tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kebutuhan kemandirian energi serta keadilan bagi masyarakat.

“Karena itu, kami di DPR RI mengambil inisiatif untuk merevisinya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal kemandirian energi, keadilan, dan persiapan menuju energi terbarukan,” ujar Syarif

Fasha usai memimpin Kunjungan Kerja dalam rangka menyerap masukan dari civitas akademisi terhadap RUU Ketenagalistrikan di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (29/08).

Ia menjelaskan, kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Mulawarman, bertujuan untuk menyerap aspirasi dari kalangan akademisi, praktisi, hingga masyarakat desa.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menekankan, revisi UU Ketenagalistrikan nantinya akan mengakomodasi arah transformasi energi, termasuk rencana transisi menuju energi terbarukan.

“Pemerintah bersama stakeholder sudah mempersiapkan roadmap, misalnya target bauran energi terbarukan hingga tahun 2029. PLN juga tengah melaksanakan program listrik desa sesuai dengan arahan Presiden agar 100 persen masyarakat mendapatkan akses listrik,” jelasnya.

Selain itu, DPR RI juga akan memperkuat regulasi agar subsidi listrik benar-benar tepat sasaran. “Insya Allah, paling lambat tahun 2026 revisi undang-undang ini sudah disahkan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian akses listrik, tetapi juga keadilan dalam pemanfaatannya,” pungkasnya.

rni/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: MUN/PTD

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya Komisi XIII DPR RI saat rapat pembentukan tim perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Tim Perumus RUU Hak Cipta

Komisi XIII DPR RI bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), VISI, dan AKSI menyepakati pembentukan tim perumus Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Kesepakatan ini dihasilkan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (27/8).

Ketua Komisi XIII Willy Aditya yang memimpin rapat menegaskan bahwa pembahasan RUU Hak Cipta harus diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar, khususnya terkait transparansi pengelolaan

royalti dan penguatan posisi para pencipta serta pelaku pertunjukan.

"Kita bersepakat untuk membentuk tim perumus, untuk merumuskan masalah-masalah apa saja yang ada, lalu dituangkan sesuai dengan level kewenangan masing-masing. Mana yang masuk undang-undang, mana yang peraturan turunan," ujar Willy dalam rapat di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesimpulan rapat, Willy menegaskan pentingnya pelibatan perwakilan pencipta musik, pelaku pertunjukan, dan organisasi profesi. VISI, AKSI, dan LMKN masing-masing diminta mengirimkan tiga nama untuk bergabung dalam tim perumus bersama Badan Keahlian DPR RI.

"VISI dan AKSI ini ibarat kepala dan kaki. Jadi, masing-masing tiga orang agarimbang. LMKN juga tiga orang. Dengan begitu, seluruh pihak bisa ikut duduk bersama," tutur Willy.

Ia juga menyampaikan bahwa inisiatif perorangan yang sebelumnya diusulkan oleh musisi Melly Goeslaw kini akan diambil alih Komisi X DPR RI untuk mempercepat proses legislasi. "Namun, Teh Melly, Once, dan Mas Dhani tetap tercatat sebagai pengusul," imbuhnya.

Willy menutup rapat dengan penegasan bahwa tim perumus akan mulai bekerja pekan depan bersama Badan Keahlian DPR RI. Seluruh bahan paparan yang telah disampaikan diminta untuk segera dikompilasi agar dapat dipetakan pasal per pasal.

"Di sini kita tidak cari gaduh. Kita cari 'enak dan *terpenak*'. Bukan hanya satu pihak yang nyaman, tapi semua pihak, baik pencipta, pelaku, maupun pengguna karya, harus merasakan manfaat yang adil," pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem ini. **hal/rdn**



Partisipasi Masyarakat dalam RUU Perampasan Aset

Wakil Ketua Badan Legislati (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan DPR akan memaksimalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset guna merespons aspirasi dari masyarakat yang ingin pembahasannya dipercepat.

Menurut dia, pembahasan RUU Perampasan Aset sudah digelar pada Senin (1/9), dan RUU tersebut kini masih berada dalam tahap penyusunan. "Kami bekerja semaksimal mungkin. Bahkan kemarin kita kan juga bahas. Hari Senin kemarin kita masuk juga," kata Sturman di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/9).

Dia mengatakan bahwa Baleg DPR RI akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU tersebut. Jangan sampai undang-undang yang dibentuk sangat jauh dari pemahaman masyarakat. "Karena masyarakat selalu diminta pendapatnya, diminta keinginannya apa. Kemudian kita jawab

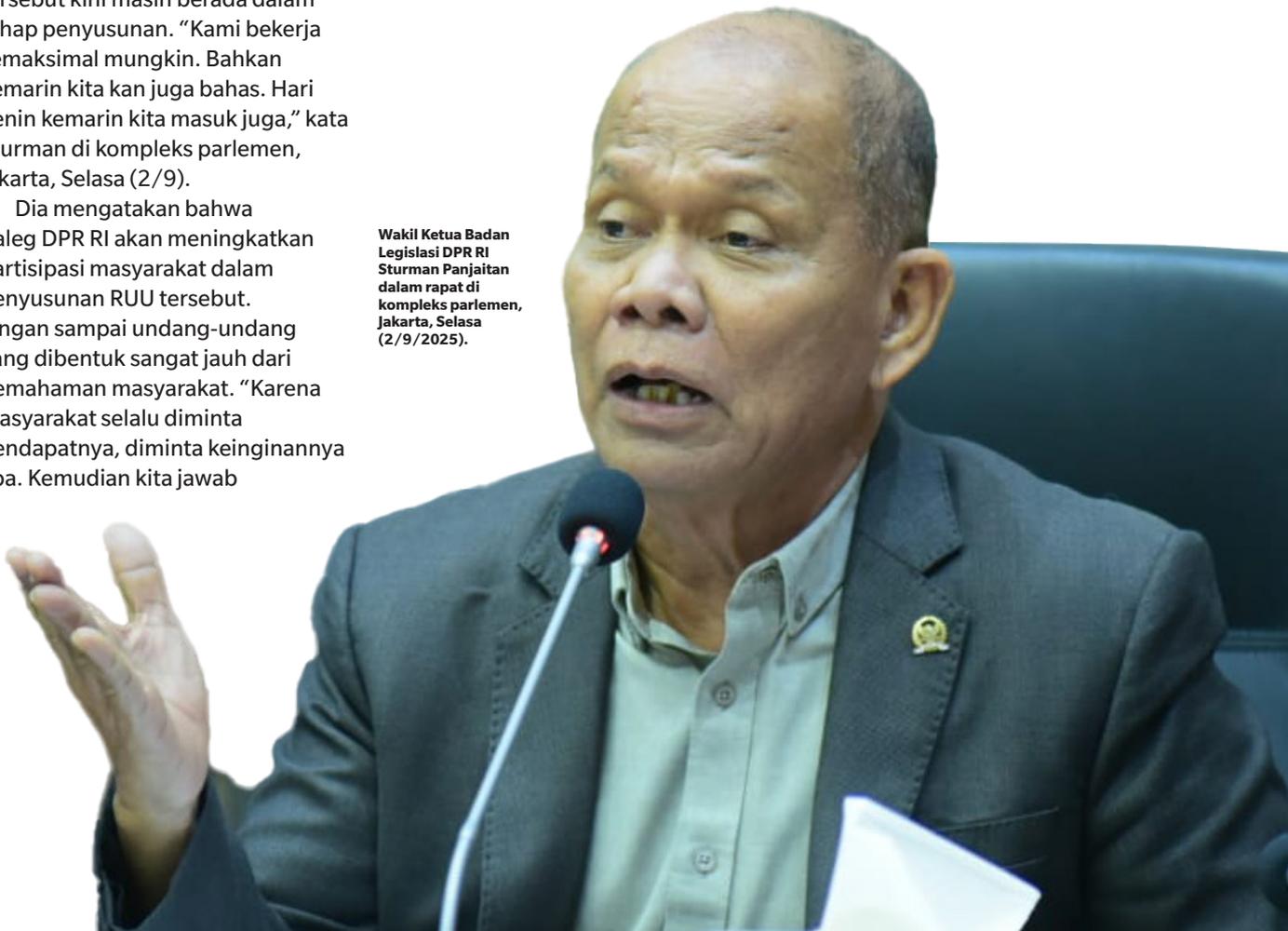
Memaksimalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset guna merespons aspirasi dari masyarakat yang ingin pembahasannya dipercepat

Wakil Ketua Badan Legislati DPR RI Sturman Panjaitan dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

pertanyaannya," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Di sisi lain, Sturman mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset harus dirancang secara hati-hati karena menyangkut urusan pidana. Menurut dia, RUU tersebut tidak boleh tumpang tindih karena ada UU lain yang juga berkaitan dengan pidana.

"Undang-undang itu harus searah, sejalan. Supaya tidak berlawanan. Makanya kita harus perlu hati-hati," katanya. **rdn**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: OJI/PDT

DPR Terus Perbaiki Kinerja



FOTO: IMRO/PDT

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade saat menerima aspirasi dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmen DPR untuk selalu membuka diri terhadap aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Andre menjelaskan, sesuai kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam pertemuan di Istana beberapa waktu lalu, DPR berkomitmen menjalin komunikasi dengan seluruh pihak.

"Hari ini pimpinan DPR menugaskan kami untuk berdialog dengan peserta aksi. Kami sudah bertemu dengan Ketua Umum dan jajaran DPP GMNI, dan atas permintaan

mereka dialog dilaksanakan di dalam gedung. Tentu kami fasilitasi," ungkap Andre usai menerima aspirasi dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).

Dalam pertemuan tersebut, DPR menerima berbagai masukan konstruktif dari DPP GMNI, termasuk kajian strategis yang akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. "Kajian ini akan kami teruskan kepada seluruh alat kelengkapan dewan dan komisi, agar menjadi bahan perbaikan kinerja DPR ke depan. Tujuannya agar DPR semakin baik dalam melayani rakyat," jelas

legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Dalam pertemuan yang dihadiri Anggota BAM DPR RI Kawendra Lukistian dan Daniel Johan ini, Andre juga menyinggung sejumlah poin penting yang disampaikan mahasiswa, di antaranya terkait penghapusan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Selain itu, Andre menyatakan DPR akan terus memperbaiki kualitas kinerja, baik dalam rapat-rapat komisi maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat di daerah pemilihan. Ia menekankan bahwa DPR juga memahami tuntutan terkait penegakan hukum yang transparan. **we/aha**





Suasana aksi massa yang dilakukan di depan Gedung DPR RI, pada Senin (25/8/2025).
Foto: Andri/bia

TNP
PARLEMEN

Perempuan Parlemen

SCAN ME



SAKSIKAN HANYA DI
[HTTPS://TVRPARLEMEN.DPR.GO.ID](https://tvrparlemen.dpr.go.id)

 youtube @tvrparlemen

 @tvrparlemen



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri